

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN SOSIAL

Syari Muda Saputra¹, Kurniawan², Sarwono³, Haeran⁴, Siti Fatimah⁵, Daud⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: syari mudasaputra1986@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze government policy regarding the improvement of public welfare through social assistance programs, as well as to examine the effectiveness of program implementation and the factors influencing its success. Social assistance programs represent a form of public policy implemented by the government to provide social protection to the poor and vulnerable groups, thereby meeting basic needs, alleviating economic burdens, and enhancing the community's quality of life. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. The study was conducted in Nipah Panjang District. Data were gathered through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, specifically targeting individuals knowledgeable about and directly involved in the implementation of the social assistance programs. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model, comprising data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. Data validity was verified through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that government policy via social assistance programs plays a crucial role in improving public welfare by meeting basic needs and providing social protection to those in need. The effectiveness of program implementation is influenced by several factors, including communication, resource availability, implementer commitment, bureaucratic structure, the accuracy of beneficiary targeting, inter-agency coordination, and transparency in implementation. Although social assistance programs contribute to improved public welfare, their implementation still requires refinement—particularly regarding the validity of beneficiary data, oversight, and program evaluation—to ensure that aid is distributed more accurately and sustainably.

Keywords: Government Policy, Public Policy, Social Assistance Programs, Public Welfare, Policy Implementation.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak, memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, serta mendapatkan akses yang adil terhadap berbagai sumber daya dan pelayanan publik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pengembangan usaha masyarakat, serta pemberian perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga memperhatikan pemerataan dan keberlanjutan. Masyarakat yang memiliki kesempatan

untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan kegiatan ekonomi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Dengan demikian, pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada terciptanya kondisi yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, memiliki peranan penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Mudrajad Kuncoro, 2018).

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif baik dalam beberapa tahun terakhir, persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kerentanan sosial masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menghadirkan berbagai kebijakan yang mampu memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui program-program bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan sosial nasional. Menurut Kementerian Keuangan, bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari risiko sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sosial ditujukan terutama kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum mampu memenuhi kebutuhannya.

Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada pedagang pasar tradisional merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Apabila keamanan pasar terpelihara dengan baik, maka pedagang akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan usahanya, sementara masyarakat sebagai konsumen akan. Namun demikian, implementasi kebijakan bantuan sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat akibat data yang belum sepenuhnya akurat. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan penyaluran bantuan, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan, serta adanya masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Berbagai permasalahan tersebut dapat mengurangi efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, program bantuan sosial juga memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bantuan yang diterima mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, menjaga konsumsi masyarakat, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan bantuan sosial perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan serta menemukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Kecamatan Nipah Panjang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pedagang, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat dari berbagai desa di sekitarnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan pasar menjadikan wilayah tersebut memiliki dinamika ekonomi yang cukup tinggi sekaligus memerlukan perhatian terhadap aspek keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peran Kepolisian Sektor Nipah Panjang menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara lancar, tertib, dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Nipah Panjang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki perkembangan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Nipah Panjang terdiri atas beberapa

desa dan kelurahan dengan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan, perikanan, pertanian, dan jasa. Keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung distribusi barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain berfungsi sebagai pusat perdagangan, pasar tradisional juga menjadi tempat masyarakat memperoleh mata pencaharian sehingga keberadaannya mempunyai nilai strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta dampak program bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas informan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Mereka dipilih karena memiliki informasi yang relevan mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial. Adapun subjek penelitian meliputi:

1. Kepala Dinas Sosial atau pejabat yang membidangi program bantuan sosial,
2. Pendamping Program Bantuan Sosial, yang bertugas mendampingi masyarakat penerima manfaat dan mengetahui secara langsung proses pelaksanaan program di lapangan.
3. Perangkat desa atau kelurahan, seperti kepala desa, lurah, atau perangkat yang terlibat dalam pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial.
4. Masyarakat penerima bantuan sosial, sebagai informan utama untuk memperoleh informasi mengenai manfaat program, kendala yang dihadapi, serta perubahan kesejahteraan yang dirasakan setelah menerima bantuan sosial.
5. Tokoh masyarakat, apabila diperlukan, sebagai informan pendukung yang dapat memberikan pandangan mengenai pelaksanaan program bantuan sosial di lingkungan masyarakat.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai persiapan sebelum turun ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan proposal penelitian, studi kepustakaan, penentuan fokus penelitian, penyusunan pedoman wawancara, pengurusan surat izin penelitian, serta melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak yang menjadi lokasi penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan merupakan proses pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial, melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan, serta mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program bantuan sosial.

3. Tahap Verifikasi dan Penyempurnaan Data

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh melalui proses verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah sesuai dengan fokus penelitian, memiliki tingkat keakuratan yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).

PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Bantuan Sosial

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Program bantuan sosial diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, serta meningkatkan kualitas hidup melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif kebijakan publik, Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui program bantuan sosial, pemerintah berupaya mengurangi tingkat kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan demikian, program bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang kesejahteraan sosial.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar masyarakat memahami tujuan, mekanisme, serta persyaratan program bantuan sosial. Penyampaian informasi yang jelas akan meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Selain komunikasi, ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi aparatur pelaksana yang kompeten, anggaran yang memadai, sarana dan prasarana pendukung, serta data penerima manfaat yang akurat. Apabila sumber daya tersebut tersedia secara optimal, maka pelaksanaan program bantuan sosial akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menghambat proses penyaluran bantuan sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai secara maksimal.

Faktor disposisi atau sikap pelaksana juga memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Aparatur yang memiliki komitmen, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi akan melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, struktur birokrasi yang jelas, didukung dengan pembagian tugas yang terkoordinasi serta prosedur kerja yang sederhana, akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial.

B. Program Bantuan Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi risiko sosial yang dihadapi akibat kondisi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, program bantuan sosial tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai atau barang, tetapi juga menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut teori kesejahteraan masyarakat yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Oleh karena itu, program bantuan sosial diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya dari sisi ekonomi semata.

Apabila program bantuan sosial dilaksanakan secara tepat sasaran, maka masyarakat penerima manfaat akan memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan

kesehatan. Dampak tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Namun demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh program bantuan sosial. Faktor lain seperti tingkat pendidikan, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi juga turut menentukan tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu, program bantuan sosial perlu didukung oleh kebijakan pemerintah lainnya, seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan usaha mikro agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Bantuan Sosial, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Melalui berbagai program bantuan sosial, pemerintah berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban ekonomi, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasinya, yang meliputi komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi antarinstansi. Apabila seluruh unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka tujuan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai.
2. Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat, validitas dan pembaruan data penerima bantuan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Program bantuan sosial pada dasarnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Namun, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh bantuan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesempatan kerja, tingkat pendapatan, kualitas pendidikan, kondisi kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, program bantuan sosial perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar manfaat yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial melalui pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran bantuan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan guna meminimalkan kesalahan sasaran dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program bantuan sosial dengan memberikan informasi yang benar pada saat pendataan, memanfaatkan bantuan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta ikut mengawasi proses penyaluran bantuan agar berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.

3. Bagi Instansi Pelaksana Program Bantuan Sosial

Instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan sosial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang jelas, pelayanan yang cepat, serta koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah, perangkat desa, dan pendamping sosial. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penerima manfaat perlu terus dilakukan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan akuntabel.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah informan, atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas masing-masing jenis program bantuan sosial secara lebih mendalam serta menganalisis pengaruhnya terhadap aspek-aspek kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

REFERENCES

- Amalia Jamaida, Nur Riski, dan Muh Shadiqul Fajri AF. "Peran Pasar Tradisional dalam Memajukan *Maqāṣid al-Syari'ah*." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 7, No. 1, 2025.
- Anderson, James E. *Public Policymaking: An Introduction*. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2015.
- Arif, Muhammad. "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 13, No. 1, 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Kecamatan Nipah Panjang Dalam Angka 2024*. Tanjung Jabung Timur: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Kecamatan Nipah Panjang Dalam Angka 2025*. Tanjung Jabung Timur: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th ed. New York: Routledge, 2018.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 15th ed. Boston: Pearson, 2017. Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 2021.
- Friedlander, Walter A. *Introduction to Social Welfare*. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 1961.
- Friedrich, Carl J. *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw-Hill, 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Edisi terbaru.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Program Bantuan Pangan*. Edisi terbaru.
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: SAGE Publications, 2020.
- Midgley, James. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publications, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. 12th ed. Boston: Pearson, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2016.